

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menangani tindak pidana pencurian data nasabah atau *Skimming*. Di Indonesia, pasal 362 KUHP mengatur tindakan ini dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda. Di Malaysia, Akta Penal (Kanun Keseksaan) mengatur tentang pengambilan data elektronik tanpa izin dan dapat dihukum dengan penjara hingga 10 tahun. Di Thailand, Undang-Undang tentang Tindakan Elektronik dan Transaksi (E-Transaction Act) memiliki ketentuan untuk mengatasi *Skimming* dengan hukuman penjara dan denda. Singapura, di sisi lain, memiliki Pasal 30 UU ITE yang mengancam pelaku *Skimming* dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda yang signifikan.
2. Dalam upaya menjaga privasi nasabah dan mencegah praktik *Skimming*, keempat negara ini telah mengesahkan sanksi yang tegas dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kejahatan *cyber*. Meskipun perbedaan dalam hukuman, semangat melindungi data nasabah dan mengatasi ancaman *Skimming* tampak menjadi fokus utama dalam ketentuan hukum dari keempat negara ini.

B. Saran

Berdasarkan analisis kerangka hukum yang ada di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura terkait tindak pidana pencurian data nasabah atau *Skimming*, terdapat beberapa saran yang dapat diambil.

1. Negara-negara ini dapat terus memperkuat kerja sama lintas batas dalam pertukaran informasi dan pengalaman dalam menangani *Skimming*. Ini akan membantu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam era digital.
2. Pemangku kepentingan hukum dan peradilan di negara-negara ini harus secara rutin mengkaji dan memperbaharui kerangka hukum yang ada agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren kejahatan siber. Hal ini akan memastikan bahwa sanksi yang ada dapat mengatasi tindakan *Skimming* dengan efektif. Selanjutnya, pemerintah juga bisa memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko dan cara menghindari *Skimming*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bank Indonesia, 2021, *Pedoman Sistem Keamanan Informasi untuk Lembaga Jasa Keuangan*, Bank Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 118.
- Iwan Setiawan, 2015, *Regulation of Unauthorised ATM/Debit Card Transactions and Consumer Protection In Indonesia: A Critical Analysis of Law And Practice*, Dissertation, Faculty of Law, Humanities and The Arts, University of Wollongong, Sidney
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Otoritas Jasa Keuangan, 2020, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Kejahatan Melalui Sistem Elektronik oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta
- Personal Data Protection Act Malaysia*
- Personal Data Protection Act Thailand*
- Persona Data Protection Act Singapura*

C. Sumber Lain

- Afraid howira, A., Wasis, & Esfandiari, F. 2023. *Juridical Analysis of Legal Protection of Personal Data in terms of Legal Certainty. Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang, Malang.*

- Ahmad, N., & Abdul Rahman, R, 2018, “Legal Framework for Combating *Skimming* Crimes in Malaysia: An Analysis of the Communication and Multimedia Act 1998 and Penal Code Offences Relating to Identity Theft and Fraudulent Use of Electronic Payment Systems”, *International Journal of Law, Government and Communication*, Vol. 3. 11.
- Akashdeep Bhardwaj, et. al., 2015, “Ransomware: A Rising Threat of New Age Digital Extortio”, *Indian Journal of Science and Technology*, Vol. 9 Issue 14, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Malaysia, Malaysia.
- Amatayakul, W., & Supachaninopwong, C, 2020, “Personal Data Protection Laws in Thailand: An Overview with Emphasis on Criminal Enforcement Measures Against Cybercrime Activities Including *Skimming* Cases”, *Journal of Science and Technology Law Review*, Chiang Mai University, Thailand, Vol. 6(1).
- Azmi, I.M, 2007, “Personal Data Protection Law: The Malaysian Experience”, *Information & Communications Technology Law*, Malaysia, Vol. 16, No. 2, Juni 2007.
- Ghui, 2018, “Do We Have Enough Data Protection Laws? [daring] The Online Citizen”, <https://www.theonlinecitizen.com/2018/06/15/do-we-have-enough-data-protection-laws/>, diakses 24 Juli 2023]
- Huiwen N, 2017, NUS College breached Data Protection Law [daring] The Straits Times, <https://www.straitstimes.com/singapore/nus-college-breached-data-protection-law>, diakses 24 Juli 2023.
- Ministry of Communications and Information, 2016, Singapore's Cybersecurity Strategy 2016, <https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-cybersecurity-strategy>, diakses pada 24 Juli 2023
- Monetary Authority of Singapore (MAS), 2020, Financial Technology in Singapore: An Overview and Guide for Entrepreneurs Monetary Authority of Singapore (MAS) - *Guidelines on Preventing Skimming at ATMs*
- NewDataPrivacyLawinMalaysia.<http://www.bakermckenzie.com/RRSingaporeNewDataPrivacyLawAug10/> Diakses pada 12 Mei 2018.
- Prasertsincharoen, N., & Srisilpa, W. (2019). Combating ATM *Skimming* in Thailand: Enhancing the Collaboration between Police and Securities Regulator for Effective Law Enforcement Strategies against Organized Crime Syndicates. *Journal of Southeast Asian Human Rights Studies* - Mahidol University, 3(2), 65-83. R. Soesilo.Loc.Cit.
- Suryadi, A. (2020). Regulasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum*, 18(2), 230-245.

Tanudjaja, D., & Simarmata (2019). Computer Misuse Act Singapore: A Comprehensive Analysis on Its Provisions Regarding Cybercrime Offenses including ATM *Skimming* Activities.

Taufik Mohammad dan Azlinda Azman, 2015, Surveying Citizen Satisfaction with the Criminal Justice System in Malaysia, *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, Vol. 23 Issue 2.

Thailand's *Cybercrime Investigation Bureau - Department of Special Investigation* (DSI) (<http://www.dsi.go.th/en>)